
Analisis Tahapan Proses Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia Berdasarkan Model William Dunn

Anggraeni Eka Sarrayu¹, Budi Purwoko², Mufarrihul Hazin³

Universitas Negeri Surabaya¹, Universitas Negeri Surabaya², Universitas Negeri Surabaya³
24010845135@mhs.unesa.ac.id¹, budipurwoko@unesa.ac.id², mufarrihulhazin@unesa.ac.id³
Jl. Lidah Wetan, Kota Surabaya

DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/jiep.v10i1.3570>

Disubmit: 25-04-2025; Direvisi: 14-05-2025; Diterima: 13-06-2025;

Keywords: Merdeka Curriculum, Policy Process, William Dunn Model

ABSTRACT

This study analyzes the stages of the Merdeka Curriculum policy process in Indonesia using William Dunn's model. As a recent educational reform, the Merdeka Curriculum emphasizes flexible, student-centered learning and aims to cultivate character and competencies relevant to the 21st century. This qualitative research employed document analysis, interviews, and observations involving stakeholders such as policymakers, principals, teachers, and students. Data analysis was conducted through thematic coding and triangulation, guided by William Dunn's stages of policy process (problem identification, formulation, implementation, and evaluation), to ensure validity and depth of findings. The results indicate that the policy process comprises four main stages: (1) identifying limitations of the previous curriculum and globalization demands, (2) formulating solutions rooted in Pancasila values and 21st-century skills, (3) implementing teacher training and resource development, and (4) evaluating learning outcomes and systemic impact. Key challenges include regional resource disparities, uneven teacher readiness, and infrastructure gaps. Conversely, the curriculum offers opportunities for innovation through project-based learning and school autonomy. The findings underscore the necessity of continuous teacher training, equitable resource distribution, and multi-stakeholder collaboration to optimize the Merdeka Curriculum's implementation.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Proses Kebijakan, Model William Dunn

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tahapan proses kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia menggunakan model William Dunn. Sebagai reformasi pendidikan terbaru, Kurikulum Merdeka memberikan tekanan pembelajaran yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik untuk membangun karakter serta kompetensi yang relevan dengan abad ke-21. Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis dokumen, wawancara, dan observasi dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan, kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Analisis data dilakukan melalui pengkodean tematik dan triangulasi, mengacu pada tahapan model William Dunn (identifikasi masalah, formulasi, implementasi, dan evaluasi), untuk memastikan validitas dan kedalaman temuan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa proses kebijakan mencakup empat tahap utama: (1) mengidentifikasi keterbatasan kurikulum sebelumnya dan tuntutan globalisasi, (2) merancang solusi berbasis nilai Pancasila dan keterampilan abad ke-21, (3) mengimplementasikan pelatihan guru dan pengembangan sumber daya, serta (4) mentransmisikan hasil pembelajaran dan dampak sistemik. Tantangan utama meliputi disparitas sumber daya antarwilayah, kesiapan guru yang tidak merata, dan kesenjangan infrastruktur. Di sisi lain, kurikulum ini menawarkan peluang inovasi melalui pembelajaran berbasis proyek dan otonomi sekolah. Temuan penelitian menekankan pentingnya pelatihan guru berkelanjutan, pemerataan sumber daya, dan kolaborasi multistakeholder guna mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka.

PENDAHULUAN

Perumusan dan penerapan kebijakan pendidikan merupakan proses yang melibatkan banyak pihak dan melibatkan berbagai tahapan serta pemangku kepentingan (Puad & Ashton, 2023). Di Indonesia, Kurikulum Merdeka atau yang dikenal dengan Kurikulum “Merdeka Belajar” merupakan perubahan signifikan dalam pendekatan pendidikan di Indonesia, yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibilitas, dan relevansi dengan kebutuhan abad ke-21 (Lembong et al., 2023). Konsep kurikulum ini dicirikan oleh model pembelajaran yang fleksibel, otonomi siswa, dan integrasi pembelajaran berbasis proyek, yang bertujuan untuk menumbuhkan pengembangan karakter dan kompetensi esensial. Implementasinya melibatkan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru, serta mendorong praktik pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Kurikulum ini merupakan inisiatif terkini yang dirancang untuk menyediakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan (Hadi et al., 2023).

Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan pendidikan nasional, seperti tuntutan globalisasi, tuntutan keterampilan baru, dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Akar permasalahan yang ditangani oleh Kurikulum Merdeka adalah ketidakcukupan kurikulum sebelumnya untuk memenuhi tuntutan globalisasi, rendahnya kinerja dalam penilaian internasional, dan perlunya penguatan karakter dan keterampilan abad ke-21 siswa. Kurikulum Merdeka juga dirancang sebagai respon adaptif terhadap tantangan era digital dan globalisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan pemikiran kritis, kreativitas, dan literasi digital di kalangan peserta didik (Saa, 2024). Mengingat skala dan dampak potensial Kurikulum Merdeka, analisis menyeluruh terhadap proses kebijakannya sangat penting untuk memahami pengembangan, implementasi, dan tantangan potensialnya. Tinjauan teoritis sangat penting untuk memberikan landasan yang kuat dalam memahami kompleksitas proses kebijakan dalam pendidikan. Penggunaan model William Dunn sebagai lensa teoritis memungkinkan eksplorasi sistematis setiap fase dalam siklus kebijakan, memastikan bahwa analisis didasarkan pada literatur ilmu kebijakan yang mapan (Bochel, 2022).

Pendekatan ini tidak hanya memperjelas kerangka konseptual penelitian tetapi juga menempatkan penelitian dalam wacana yang lebih luas tentang analisis kebijakan pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensifnya terhadap proses kebijakan

Kurikulum Merdeka dengan menggunakan model proses kebijakan William Dunn, yang belum banyak diterapkan dalam penelitian sebelumnya tentang reformasi kurikulum Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis proses kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia melalui lensa model proses kebijakan William Dunn, yang menyediakan kerangka terstruktur untuk memeriksa berbagai tahap yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Wahyuningsih et al., 2024).

Model proses kebijakan William Dunn merupakan kerangka analitis komprehensif yang membagi proses kebijakan ke dalam beberapa tahap utama: identifikasi masalah, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penghentian kebijakan. Setiap tahap melibatkan aktivitas dan proses pengambilan keputusan spesifik yang membantu menangani isu publik secara sistematis dan menilai efektivitas intervensi kebijakan. Dengan menerapkan model ini, peneliti dapat secara kritis memeriksa bagaimana kebijakan pendidikan dikembangkan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks teoritis yang terstruktur. Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek deskriptif atau tantangan spesifik dari implementasi Kurikulum Merdeka, sedangkan penelitian ini menawarkan analisis komparatif dan terstruktur berdasarkan kerangka proses kebijakan teoritis. Proses kebijakan Model William Dunn ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk membedah tahapan rumit dari pengembangan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Model ini mencakup berbagai tahapan, termasuk identifikasi masalah, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan penghentian kebijakan (Thoriq & Mahmudah, 2023).

Kebebasan intelektual menjadi prinsip dasar Kurikulum Merdeka dengan mereformasi pendidikan sekolah untuk memprioritaskan kemandirian siswa dan pendidikan yang responsif terhadap situasi dan pengembangan siswa yang menyeluruh. Siswa di bawah Kurikulum Merdeka memperoleh kebebasan instruksional selain kegiatan pembelajaran yang dipersonalisasi yang dirancang berdasarkan minat dan kebutuhan pribadi mereka (Anzani, 2023). Guru menerima kekuatan melalui desain kurikulum ini untuk membuat instruksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa bersama dengan pengembangan pemikiran kritis dan keterampilan kolaboratif di samping kreativitas (Rahmawati, 2023). Dikembangkan oleh Kurikulum Merdeka, para guru fokus pada pertumbuhan siswa yang etis dan moral yang menyampaikan nilai-nilai Pancasila nasional (Sari et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan dukungan strategis terhadap Generasi Emas Indonesia melalui pengembangan otonomi siswa bersama dengan pendidikan keterampilan abad ke-21 tetapi menghadapi tantangan dari kesiapan guru di samping ketidaksetaraan sumber daya (Syahrir et al., 2024).

Wawasan tentang perkembangan proses kebijakan Kurikulum Merdeka sangat penting karena wawasan tersebut menetapkan berbagai poin penting. Pengetahuan yang diperoleh dari analisis kebijakan mengungkap pengaruh terhadap pengembangan kurikulum serta mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang berpartisipasi beserta rintangan yang dihadapi pada saat implementasi (Syofyan & Oknaryana, 2021). Para pembuat kebijakan bersama dengan para guru dapat meningkatkan adopsi kurikulum di seluruh negeri dengan mengevaluasi aset kebijakan dan kekurangan yang diperoleh dari proses tersebut. Studi ini menganalisis prosedur pembuatan kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia melalui pemeriksaan model William Dunn. Penelitian ini penting karena memberikan gambaran holistik tentang dinamika, tantangan, dan peluang dalam proses kebijakan Kurikulum Merdeka, yang berfungsi sebagai referensi berharga

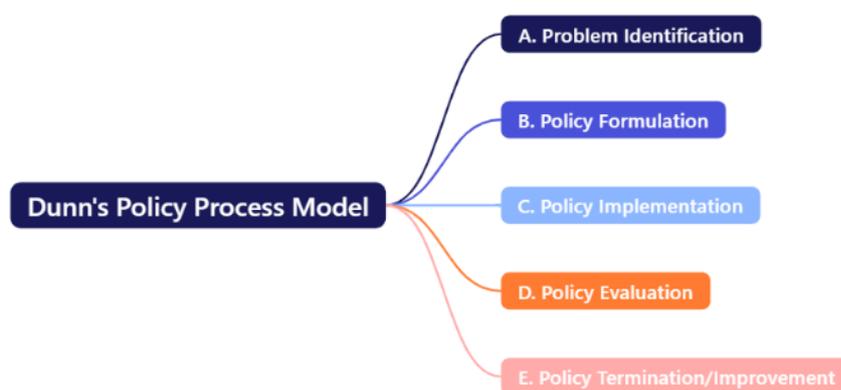
bagi para pembuat kebijakan dan praktisi pendidikan untuk mengoptimalkan implementasinya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif proses kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia (Saputra & Hadi, 2022). Metode pengumpulan data meliputi analisis dokumen, wawancara, dan observasi. Analisis dokumen meliputi telaah menyeluruh dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, publikasi akademis, dan laporan media yang terkait dengan Kurikulum Merdeka (Sucipto et al., 2024). Dokumen-dokumen ini memberikan informasi berharga tentang tujuan, desain, strategi implementasi, dan mekanisme evaluasi kurikulum. Untuk mengumpulkan laporan langsung dan beragam perspektif tentang proses kebijakan Kurikulum Merdeka, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan para pemangku kepentingan utama. Pengambilan sampel secara sengaja digunakan untuk memilih peserta yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan, termasuk pembuat kebijakan, pakar pendidikan, kepala sekolah, guru, dan siswa. Wawancara tersebut mengeksplorasi pemahaman peserta tentang kurikulum, keterlibatan mereka dalam pengembangan dan implementasinya, persepsi mereka tentang kekuatan dan kelemahannya, dan saran mereka untuk perbaikan.

Analisis data melibatkan kombinasi pendekatan deduktif dan induktif. Proses analisis data dimulai dengan pendekatan deduktif, dengan menggunakan model proses kebijakan William Dunn sebagai kerangka kerja untuk memandu pengodean dan kategorisasi awal data.

Gambar 1. Tahapan Proses Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Model Proses Kebijakan William Dunn



Sumber: Diadaptasi dari Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). New York: Routledge

Data tersebut kemudian dianalisis secara induktif untuk mengidentifikasi tema dan pola yang muncul terkait dengan proses kebijakan Kurikulum Merdeka. Perangkat lunak analisis data kualitatif digunakan untuk memfasilitasi proses pengkodean dan analisis. Menurut Lubis et al. (2024) penelitian kualitatif terbukti cocok untuk penelitian ini karena memungkinkan penyelidikan komprehensif terhadap detail rumit dari proses kebijakan Kurikulum Merdeka. Analisis sosial

melalui penelitian kualitatif berupaya untuk menemukan dan menafsirkan makna yang mendasari masalah sosial yang memengaruhi banyak subjek manusia (Lubis et al., 2024). Investigasi ini menggunakan observasi pemangku kepentingan dan data pengalaman untuk menawarkan pemahaman yang luas tentang proses kebijakan pendidikan Indonesia serta implikasi pendidikannya.

Selanjutnya dilakukan observasi untuk mengumpulkan data (Ferdaus & Novita, 2023). Observasi dilakukan di sekolah-sekolah terpilih yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Catatan lapangan diambil selama observasi untuk mencatat interaksi antara guru dan siswa, penggunaan sumber belajar, dan lingkungan kelas secara keseluruhan. Pemilihan partisipan dilakukan langsung oleh penulis untuk memastikan representasi yang beragam dari tingkatan dan pengalaman (Jo, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Proses Kebijakan Dunn dan Kurikulum Merdeka

Bagian berikut menyajikan analisis komprehensif tentang proses kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia melalui sudut pandang Model Proses Kebijakan William Dunn. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis setiap tahap pengembangan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi dan penghentian kebijakan, guna memahami dinamika, tantangan, dan peluang yang mendasarinya terkait dengan implementasi kurikulum. Dengan menerapkan kerangka kerja Dunn, studi ini berupaya memberikan perspektif terstruktur dan kritis tentang bagaimana Kurikulum Merdeka diformulasikan, dijalankan, dan dinilai, serta menyoroti wawasan utama yang dapat menginformasikan perbaikan kebijakan dan reformasi pendidikan di masa mendatang di Indonesia.

1. Identifikasi Masalah

Model proses kebijakan William Dunn dimulai dengan identifikasi masalah yang mendeteksi perubahan kebijakan dan kebutuhan kebijakan baru. Beberapa faktor inti memengaruhi fase identifikasi masalah pengembangan Kurikulum Merdeka seperti definisi kelemahan Kurikulum 2013 bersama dengan persyaratan dari pasar kerja kontemporer dan persyaratan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lebih khusus lagi, tiga akar masalah inti diidentifikasi selama fase ini. Pertama, banyak guru menunjukkan pemahaman dan kesiapan yang terbatas untuk menerapkan Kurikulum Merdeka, karena mereka tidak memiliki pelatihan yang memadai dan panduan yang jelas untuk mengadopsi pendekatan pedagogis baru dan mengintegrasikan teknologi secara efektif. Kedua, sumber daya dan infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu, menghambat penerapan kurikulum yang adil dan membatasi akses ke pengalaman belajar yang berkualitas. Ketiga, konten kurikulum sebelumnya sudah ketinggalan zaman dan gagal membahas keterampilan penting abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara hasil pendidikan dan tuntutan tenaga kerja modern. Standar pendidikan sebelumnya yang berjudul Kurikulum 2013 menuai kritik tentang penekanannya yang berlebihan pada hafalan sementara kehilangan hubungan dengan kehidupan siswa (Nurhattati et al., 2020). Guru

menghadapi kesulitan internal dan eksternal selama penerapan Kurikulum Nasional menurut Anif et al. (2020). Kemajuan teknologi yang bergerak cepat dan aktivitas ekonomi dunia dari tenaga kerja abad ke-21 membutuhkan kompetensi penting baru seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah serta kemampuan kolaboratif yang tidak diajarkan dengan baik oleh kurikulum yang sudah ketinggalan zaman. Inisiatif transformasi pendidikan di bawah kebijakan pemerintah mendorong inklusi teknologi dalam pendidikan menurut Kochetkova dan Kochetkov (2022) melalui Kurikulum Merdeka. Negara ini menghadapi masalah dengan kualitas pendidikan yang buruk karena menunjukkan kinerja di bawah rata-rata dalam survei siswa di seluruh dunia seperti Program Penilaian Siswa Internasional.

2. Perumusan Kebijakan

Beberapa alternatif kebijakan dikembangkan dalam tahap ini untuk menyelesaikan masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Sebuah tim yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencakup akademisi bersama dengan para pendidik dan praktisi untuk membuat Kurikulum Merdeka. Penelitian ekstensif yang melibatkan konsultasi pemangku kepentingan mengarahkan tim untuk mengidentifikasi opsi kebijakan yang luar biasa. Perumusan kebijakan utama Kurikulum Merdeka meliputi: (1) menekankan pembelajaran berbasis proyek sebagai pendekatan instruksional inti untuk menumbuhkan karakter dan keterampilan penting siswa; (2) berfokus pada kompetensi penting dengan merampingkan konten pembelajaran dan memprioritaskan literasi dan numerasi; (3) memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal; (4) memperkuat Profil Siswa Pancasila melalui proyek-proyek khusus dan pendidikan karakter; (5) memperkenalkan mata pelajaran terintegrasi baru dan struktur pembelajaran yang lebih fleksibel; dan (6) menyediakan tiga jalur implementasi-Belajar Mandiri, Perubahan Mandiri, dan Berbagi Mandiri-sehingga sekolah dapat mengadopsi kurikulum berdasarkan kesiapan dan kapasitas mereka. Para perancang Kurikulum Merdeka membuatnya fleksibel dengan menempatkan siswa sebagai pusatnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masa kini (Ferdaus & Novita, 2023). Kurikulum ini mendukung pembelajaran berbasis proyek yang membantu siswa menerapkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan masyarakat yang sebenarnya (Sumaludin, 2022). Fitur pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membangun Profil Siswa Pancasila melalui pendekatannya (Kadir, 2023). Pendidikan anak usia dini melalui Kurikulum Merdeka berkaitan langsung dengan pengembangan Profil Pelajar Pancasila melalui penekanannya pada pertumbuhan siswa secara menyeluruh yang dimulai pada tahap awal (Anzani, 2023).

3. Implementasi Kebijakan

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. Pelaksanaan kebijakan harus melalui langkah-langkah praktis yang harus diikuti oleh departemen terkait agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Implementasi Kurikulum Merdeka didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelatihan guru, pengembangan sumber belajar, dan pembentukan sistem monitoring dan evaluasi. Berbagai penelitian terkini

menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka menghadapi beberapa tantangan yang terus berulang, antara lain pemahaman guru yang terbatas terhadap konsep kurikulum, sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai, serta perlunya penguatan kemampuan guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa (Sari & Wahyuni, 2024; Marwan, 2023; Sucipto dkk., 2024). Permasalahan yang dihadapi guru sering kali terkait dengan kurangnya pelatihan dan kesiapan terhadap pendekatan pedagogi baru, sementara keterbatasan sumber daya terutama terjadi di daerah terpencil dan kurang mampu (Sari & Wahyuni, 2024; Sari & Wahyuni, 2024; Wahira dkk., 2023). Selain itu, kesulitan dalam menyelaraskan praktik penilaian dengan tujuan holistik kurikulum telah sering dilaporkan (Marwan, 2023). Mengatasi tantangan ini memerlukan pengembangan profesional berkelanjutan, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan upaya kolaboratif di antara para pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil di berbagai lingkungan pendidikan (Sari & Wahyuni, 2024; Sucipto et al., 2024; Wahira et al., 2023). Program pendidikan yang secara khusus ditujukan kepada guru memberikan manfaat yang kuat terhadap pencerahan Kurikulum Merdeka dan praktik kelas sehingga menciptakan lingkungan pendidikan dan hasil akademis yang lebih efektif (Sari & Wahyuni, 2024). Menurut Pertiwi dan Pusparini (2021) Kurikulum Merdeka bergantung pada guru untuk pencapaiannya. Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada tindakan guru. Staf pendidikan harus meningkatkan efektivitas operasional mereka terkait penerapan Kurikulum Merdeka (Kasman & Lubis, 2022).

4. Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi kebijakan menjadi persyaratan penting untuk memeriksa pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka sekaligus menemukan area peningkatan yang potensial. Evaluasi terbaru Kurikulum Merdeka menyoroti kemajuan dan tantangan yang terus ada dalam mencapai hasil yang diharapkan. Studi telah menemukan bahwa meskipun kurikulum telah meningkatkan keterlibatan siswa, menumbuhkan pemikiran kritis, dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pembelajaran, kendala signifikan tetap ada dalam hal kesiapan guru, penyelarasan penilaian, dan distribusi sumber daya yang adil (Lestari et al., 2023; Hanayanti et al., 2023; Marwan, 2023; Sari & Wahyuni, 2024). Praktik penilaian, khususnya, sering kali kesulitan untuk sepenuhnya menangkap perkembangan holistik siswa seperti yang dibayangkan oleh kurikulum, dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru diperlukan untuk memastikan implementasi yang konsisten dan efektif (Hanayanti et al., 2023; Sari & Wahyuni, 2024). Studi evaluasi kebijakan merekomendasikan pemantauan berkala, umpan balik pemangku kepentingan, dan penyempurnaan alat penilaian secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan dampak kurikulum dan mengatasi kesenjangan dalam praktik (Lestari et al., 2023; Hanayanti et al., 2023).

B. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai solusi reformasi pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai kendala meskipun awalnya menjanjikan. Kesulitan mendasar muncul karena beberapa sekolah di daerah terpencil menghadapi sumber daya pendidikan yang tidak mencukupi

dan infrastruktur yang buruk (Sucipto et al., 2024). Keberhasilan penerapan program pendidikan ini menghadapi hambatan kritis karena guru menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda sementara siswa menunjukkan perbedaan dalam aksesibilitas teknologi (Sari & Wahyuni, 2024).

Sekolah-sekolah di seluruh negeri tidak memiliki fasilitas yang cukup serta peralatan dan sumber belajar yang memadai untuk menyampaikan kurikulum dengan baik. Hambatan utama ada dalam persyaratan untuk menawarkan pengembangan staf dan bantuan yang memadai kepada guru. Guru membutuhkan lebih banyak pelatihan mengenai prinsip dan praktik Kurikulum Merdeka karena banyak dari mereka belum secara efektif memperoleh pengetahuan ini. Berbagai hambatan seperti sumber daya pengajaran yang tidak memadai dan fasilitas pendidikan yang buruk serta tidak adanya persiapan guru yang tepat menciptakan tantangan bagi keberhasilan implementasi kurikulum (Hanayanti et al., 2023). Lebih jauh lagi, guru pada umumnya menganggap Kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas dan kompatibilitas yang lebih besar dengan praktik yang ada, tetapi mereka juga melaporkan peningkatan kompleksitas dan tuntutan administratif, yang menggarisbawahi perlunya dukungan berkelanjutan dan pengembangan profesional (Hapsari & Widiastuty, 2023).

Namun, Kurikulum Merdeka menghasilkan berbagai peluang untuk meningkatkan standar pendidikan Indonesia meskipun ada kendala program. Pendekatan pendidikan yang dipimpin siswa dikombinasikan dengan penilaian proyek di bawah Kurikulum Merdeka membangun kemampuan analisis penting bersama dengan kekuatan pemecahan masalah dan kerja sama kelompok pada peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metodologi utama Kurikulum Merdeka yang memberikan hasil pencapaian siswa yang lebih baik di samping pencapaian pendidikan yang bertanggung jawab (Puspitasari & Wahyuni, 2023). Sekolah dan guru yang memperoleh otonomi melalui sistem ini dapat mengembangkan materi pendidikan yang membahas kebutuhan siswa yang unik dalam konteks pendidikan tertentu. (Fakhrudin dkk., 2023)

C. Analisis Tahapan Proses Kebijakan dengan Model Dunn

Tabel ini, yang diambil dari dokumen Anda, menguraikan tahapan-tahapan proses kebijakan Kurikulum Merdeka berdasarkan model William Dunn. Tabel ini menyoroti kegiatan-kegiatan utama, tantangan-tantangan potensial, dan strategi-strategi mitigasi untuk setiap tahapan. Implementasi Kurikulum Merdeka memerlukan perencanaan, koordinasi, dan kolaborasi yang cermat di antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang (Wahyuningsih dkk., 2024).

Analisis ini tidak hanya selaras dengan model proses kebijakan Dunn sebagai kerangka teoritis, tetapi juga mencerminkan interaksi dinamis antara teori dan praktik dunia nyata dalam analisis kebijakan. Seperti yang ditekankan Dunn (2017), analisis kebijakan pada dasarnya pragmatis dan eklektik, yang membutuhkan sintesis pengetahuan teoritis dengan kebijaksanaan praktis dan pengalaman pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan pendidikan yang kompleks. Dalam praktiknya, siklus kebijakan Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa tahapan seperti formulasi, implementasi, dan evaluasi tidak sepenuhnya linier, tetapi sering kali tumpang tindih, berinteraksi, dan membutuhkan umpan balik dan adaptasi berkelanjutan menggemakan pemikiran sistem dan pendekatan iteratif yang disorot dalam teori kebijakan (Dunn, 2017; Cairney, 2019; Hanayanti et al., 2023). Mendialogkan temuan dengan teori dan pengalaman lapangan mengungkapkan bahwa

sementara model terstruktur memberikan panduan yang berharga, hasil kebijakan yang sukses bergantung pada kolaborasi, fleksibilitas, dan respons yang berkelanjutan terhadap isu-isu yang muncul dalam sistem pendidikan (Lee, 2025; Wahyuningsih et al., 2024).

Tabel 1. Tahapan Proses Kebijakan Kurikulum Merdeka Berdasarkan Model William Dunn

Tahap Kebijakan	Kegiatan Utama	Tantangan Potensial	Strategi Mitigasi
Identifikasi Masalah	Mengenali kekurangan kurikulum sebelumnya dan kebutuhan abad 21.	Penolakan terhadap perubahan dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan kurikulum lama.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam proses identifikasi masalah dan memberikan penjelasan yang jelas tentang manfaat kurikulum baru.
Perumusan Kebijakan	Mengembangkan berbagai pilihan kebijakan untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi.	Kurangnya sumber daya dan keahlian untuk mengembangkan pilihan kebijakan yang efektif.	Membentuk tim ahli yang terdiri dari akademisi, pendidik, dan praktisi untuk mengembangkan kurikulum.
Implementasi Kebijakan	Menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata dan memastikan implementasinya efektif.	Kurangnya sumber daya dan infrastruktur di beberapa sekolah.	Memberikan pelatihan bagi guru, mengembangkan sumber daya belajar, dan membangun sistem pemantauan dan evaluasi.
Evaluasi Kebijakan	Menilai efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.	Kesulitan dalam mengukur dampak kebijakan terhadap hasil belajar siswa.	Melakukan evaluasi berkala untuk menilai dampak kurikulum terhadap hasil belajar siswa, efektivitas guru, dan kualitas keseluruhan.

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Peraturan Nomor 56 Tahun 2022 dan Keputusan Kepala BSKAP Nomor 044/H/KR/2022 tentang Pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada Satuan Pendidikan.

KESIMPULAN

Kurikulum Merdeka memiliki kekuatan untuk mengubah pendidikan Indonesia sekaligus memberi siswa kemampuan untuk terus belajar sepanjang hidup mereka dan berkontribusi secara aktif bagi masyarakat. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan Kurikulum Merdeka bergantung pada peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan, distribusi sumber daya yang adil, dan evaluasi kebijakan yang konsisten untuk memastikan keselarasan dengan tujuan pendidikan. Para pembuat kebijakan disarankan untuk memperkuat pengembangan profesional berkelanjutan

bagi guru, memprioritaskan peningkatan infrastruktur di sekolah-sekolah yang kekurangan sumber daya, dan membangun mekanisme umpan balik rutin yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi kurikulum adaptif. Namun, studi ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan data yang terbatas pada sekolah-sekolah tertentu dan partisipan yang dipilih secara purposive, sehingga hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh konteks pendidikan di Indonesia. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan memungkinkan adanya subjektivitas dalam interpretasi data.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua responden, staf institusi, asisten peneliti, dan kolega yang mendukung penelitian ini, serta keluarga dan teman-teman saya atas dukungan mereka selama proses penelitian. Bantuan dan kerja sama mereka yang berharga sangat berperan dalam penyelesaian pekerjaan ini.

REFERENSI

- Aji, KA (2023). Tinjauan Pustaka: Hubungan Kurikulum Merdeka dengan Prestasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Jasmani (JPJ)*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.55081/jpj.v4i1.732>
- Anif, S., Sutopo, A., & Prayitno, HJ (2020). Validasi Lesson Study: Model Pengembangan Guru IPS dan IPA dalam Implementasi Kurikulum Nasional di Sekolah Muhammadiyah, Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Universal*, 8(1), 253. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080132>
- Anzani, RA (2023). Pendekatan Berpusat pada Siswa dalam Implementasi Guru Kurikulum Merdeka dalam Pengajaran Bahasa Inggris di SMP Ma'arif NU Paguyangan, Brebes. *At-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 110–129. <https://doi.org/10.18592/let.v8i2.2394>
- Anzani, RA (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka pada Peserta Didik Berprofil Pancasila di Pendidikan Anak Usia Dini. *Atfaluna: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Islam*, 6(2), 85–100. <https://doi.org/10.32505/ataluna.v6i2.6517>
- Bochel, H. (2022). *The Policy Process*. 289–294. <https://doi.org/10.1002/9781394260430.ch42>
- Cairney, P. (2019). Analisis Kebijakan dalam 750 kata: William Dunn (2017) Analisis Kebijakan Publik. Diperoleh dari <https://paulcairney.wordpress.com/2019/12/13/analisis-kebijakan-dalam-750-kata-william-dunn-2017-analisis-kebijakan-publik/>
- Dunn, WN (2017). *Analisis Kebijakan Publik* (edisi ke-6). Routledge.
- Fakhrudin, IA, Probosari, RM, Indriyani, NY, Khasanah, AN, & Utami, B. (2023). Implementasi Pembelajaran Batang Dalam Kurikulum Merdeka: Pemetaan Kesiapan, Hambatan Dan Tantangan Pada Guru Smp. *Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.35906/resona.v7i1.1266>
- Ferdaus, SA, & Novita, D. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran Bahasa Inggris di SMK di Indonesia. *Briliant Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(2), 297. <https://doi.org/10.28926/briliant.v8i2.1201>
- Gonsalves, C. (2024). Dampak AI Generatif pada Pemikiran Kritis: Meninjau Kembali Taksonomi Mekar.
- Hadi, A., Marniati, M., Ngindana, R., Kurdi, MS, Kurdi, MS, & Fauziah, F. (2023). Paradigma Baru Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1497. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3126>

- Hanayanti, H., Tahapary, NL, Basalama, PN, & Miniaty, Y. (2023). Menggali Tantangan Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah: Tinjauan Pustaka. *Matai: Jurnal Internasional Pendidikan Bahasa*, 4(1), 115-121. <https://doi.org/10.30598/matai.v4i1.11651>
- Hapsari, AD, & Widiastuty, N. (2023). Interpretasi Guru terhadap Kurikulum Merdeka Sebagai Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 57(2), 123–134. <https://journal.unnes.ac.id/jurnal/jktp/artikel/unduh/16283/3098>
- Jo, H. (2025). Interaksi antara budaya kolaboratif, kepemimpinan pemberdayaan, dan lingkungan kerja TI di sektor publik: Studi metode campuran. *Jurnal Internasional Manajemen Informasi*, 82, 102883. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102883>
- Kadir, HA (2023). Penerapan Profil Mahasiswa Pancasila. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Kontemporer Indonesia*, 2(3), 349. <https://doi.org/10.55927/modern.v2i3.4116>
- Kasman, K., & Lubis, SK (2022). Rancangan Instrumen Evaluasi Kinerja Guru dalam Penerapan Paradigma Pembelajaran Baru Kurikulum Merdeka. *Jurnal Kependidikan Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan Pengajaran Dan Pembelajaran*, 8(3), 760. <https://doi.org/10.33394/jk.v8i3.5674>
- Kochetkova, T., & Kochetkov, A. (2022). Tinjauan Analitis Kebijakan Pendidikan tentang Transformasi Digital Pendidikan Sekolah. *Prosiding Ilmu Pendidikan Eropa*, 22043, 212–221. <https://doi.org/10.15405/epes.22043.23>
- Lee, S. (2025). Analisis Kebijakan Baru yang Segar: Teori Bertemu Praktik. *Blog Analisis Angka*. <https://www.numberanalytics.com/blog/teori-analisis-kebijakan-baru-yang-segar-bertemu-dengan-praktik>
- Lembong, JM, Lumapow, HR, & Rotty, VNJ (2023). Implementasi Merdeka Belajar Sebagai Transformasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.4620>
- Lestari, NAP, Wahyuni, LTS, Arnyana, IPB, & Dantes, N. (2023). Analisis Kebijakan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Internasional*, 7(4), 567–575. <https://doi.org/10.23887/ijee.v7i4.64103>
- Lubis, A., Sinaga, NA, & Sazali, H. (2024). Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Permasalahan Tanah Eks Hgu Ptpn Ii (Persero) Di Sumatera Utara. *Sosiohumaniora*, 26(1), 59. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47380>
- Marwan. (2023). Implementasi dan Isu-isu Kurikulum Merdeka. *COSMOS: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi*, 1(1), 28–31.
- Nurhattati, N., Matin, M., Buchdadi, AD, & Yusuf, CF (2020). Sertifikasi Guru di Indonesia: Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Riset Pendidikan Universal*, 8(5), 1719. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080508>
- Oecd. (2020). Evaluasi Kebijakan Pendidikan – Meninjau Lanskap Oecd. *Makalah Kerja Pendidikan Oecd*, No. 242. <https://doi.org/10.1787/19939019>
- Pertiwi, AK, & Pusparini, R. (2021). Perspektif Guru Bahasa Inggris SMK Terhadap Kurikulum “Merdeka Belajar”. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan*, 3(5), 1982. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.672>
- Puad, L. M. A. Z., & Ashton, K. (2023). A critical analysis of Indonesia's 2013 national curriculum: Tensions between global and local concerns. *The Curriculum Journal*, 34, 521–535. <https://doi.org/10.1002/curj.194>
- Puspitasari, D., & Wahyuni, S. (2023). Pembelajaran Berbasis Proyek Kurikulum Merdeka Dilihat Dari Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(2), 31-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10459163>
- Rahman, M. (2023). Analisis Dampak Kebijakan Kurikulum Merdeka terhadap Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 11(2), 513–530. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.801>

- Rahmawati, IS (2023). Evaluasi Program Pendidikan: Tinjauan Terhadap Efektivitas dan Tantangan. *El-Idare Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 128. <https://doi.org/10.19109/elidare.v9i2.20229>
- Saa, S. (2024). Kurikulum Merdeka: Adaptasi Kebijakan Pendidikan Indonesia di Era Digital dan Tantangan Global. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(3), e07323. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n3-168>
- Saputra, DW, & Hadi, MS (2022). Persepsi Guru Sekolah Dasar Jakarta Utara Dan Kepulauan Seribu Tentang Kurikulum Merdeka. *Jurnal Holistika*, 6(1), 28. <https://doi.org/10.24853/holistika.6.1.28-33>
- Sari, FFK, Sukarno, S., & Murwaningsih, T. (2023). Paradigma Baru Kurikulum Merdeka: Implementasi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Internasional*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.23887/ijee.v7i1.54092>
- Sari, NA, & Wahyuni, S. (2024). Tantangan Manajemen dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Al-Hayat: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(3), 711. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.711>
- Sari, NA, & Wahyuni, S. (2024). Dampak Pelatihan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Internasional Multidisiplin*, 14, 14–22. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i3.711>
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7900>
- Sucipto, S., Sukri, M., Patras, YE, & Novita, L. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Kalam Cendekia Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.84353>
- Sumaludin, MM (2022). Implementasi Merdeka Belajar melalui Museum sebagai Sumber Belajar dalam Pembelajaran Sejarah Berbasis Proyek Terdiferensiasi. *Riwayat Jurnal Pendidikan Sejarah dan Humaniora*, 5(1), 195. <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.26643>
- Syahrir, S., Marliyani, I., & Iskandar, A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka untuk Mewujudkan Generasi Emas Indonesia: Tinjauan Pustaka yang Sistematis. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 16(2), 1434–1450. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.6580>
- Syofyan, R., & Oknaryana. (2021). Redesain Pembelajaran Ekonomi Berbasis Keterampilan 4C di Sekolah Menengah Atas di Padang. *Advances in Economics, Business and Management Research/Advances in Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210616.058>
- Thoriq, A., & Mahmudah, FN (2023). Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Esd): Tinjauan Literatur Sistematis tentang Desain Strategi Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Studi Pendidikan Eropa*, 10(5). <https://doi.org/10.46827/ejes.v10i5.4803>
- Wahira, N., Habib, H., & Hasanah, M. (2023). Implementasi dan Isu-isu Kurikulum Merdeka. *COSMOS: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, dan Teknologi*, 1(1), 28–31.
- Wahyuningsih, RS, Zahro, F., Anggrestia, NV, Khasanah, MP, & Mardiyah, AA (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 276. <https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i2.3616>